

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI POLITIK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI KEMENDAGRI

Marianus Aleksander Jemahu

ABSTRACT

This study analyzes the influence of human resource capacity and information technology infrastructure availability on the effectiveness of the implementation of the Domestic Political Information System (SIMPOLDAGRI) within the Directorate of Domestic Politics, Ministry of Home Affairs. The study was motivated by the strategic need for accurate, timely, and integrated political information, while implementation still faces variations in operator competence, delays in data input and reporting, unequal network quality, and limitations in technical support. A quantitative explanatory survey design was employed. The study population comprised 570 SIMPOLDAGRI managers in the Directorate of Domestic Politics and provincial/regency/city Kesbangpol units, with a sample of 85 respondents determined using the Taro Yamane formula. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed with validity and reliability testing, normality and homogeneity tests, simple and multiple regression, correlation, coefficient of determination, t-tests, F-tests, and partial correlation. The results show that human resource capacity has a positive and significant effect on implementation effectiveness, with the regression equation $Y = 28.971 + 0.416X_1$, $r = 0.495$, and a contribution of 24.5 percent. Information technology infrastructure availability also has a positive and significant effect, with $Y = 15.569 + 0.799X_2$, $r = 0.559$, and a contribution of 31.2 percent. Simultaneously, both variables significantly affect SIMPOLDAGRI effectiveness with $Y = 11.513 + 0.224X_1 + 0.587X_2$, $R = 0.601$, $R^2 = 0.361$, and $F = 23.195$ ($p < 0.05$). These findings indicate that infrastructure availability is the stronger partial predictor, but sustainable implementation effectiveness depends on the integration of competent human resources and reliable technological infrastructure.

Keywords: Human Resource Capacity, Information Technology Infrastructure, Implementation Effectiveness, SIMPOLDAGRI, Digital Government

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Penelitian dilatarbelakangi oleh kebutuhan strategis akan informasi politik yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi, sementara implementasi sistem masih menghadapi variasi kompetensi operator, keterlambatan input dan pelaporan, ketidakmerataan kualitas jaringan, serta keterbatasan dukungan teknis. Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 570 pengelola SIMPOLDAGRI pada Direktorat Politik Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota, dengan sampel 85 responden yang ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, normalitas dan homogenitas, regresi sederhana dan berganda, korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F, dan korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi dengan persamaan $Y = 28,971 + 0,416X_1$, $r = 0,495$, dan kontribusi 24,5 persen. Ketersediaan infrastruktur TI juga berpengaruh positif dan signifikan dengan persamaan $Y = 15,569 + 0,799X_2$, $r = 0,559$, dan kontribusi 31,2 persen. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan persamaan $Y = 11,513 + 0,224X_1 + 0,587X_2$, $R = 0,601$, $R^2 = 0,361$, dan $F = 23,195$ ($p < 0,05$). Temuan menunjukkan bahwa infrastruktur TI merupakan prediktor parsial yang lebih kuat, namun efektivitas implementasi yang berkelanjutan membutuhkan integrasi SDM yang kompeten dengan infrastruktur teknologi yang andal.

Kata Kunci: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi, Efektivitas Implementasi, SIMPOLDAGRI, Pemerintahan Digital

PENDAHULUAN

Dinamika pemerintahan pada era Revolusi Industri 4.0 menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan organisasi publik yang berbasis data. Bagi Kementerian Dalam Negeri, ketersediaan informasi politik yang cepat, akurat, dan terintegrasi memiliki nilai strategis karena menjadi dasar deteksi dini, koordinasi, pencegahan konflik, dan pengambilan keputusan mengenai perkembangan politik di daerah. Keterlambatan atau ketidakakuratan informasi dapat menurunkan kualitas respons kebijakan dan pada akhirnya memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan pelaporan politik yang efektif serta terkoordinasi. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Politik Dalam Negeri mengimplementasikan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) sebagai wadah terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkembangan politik dari daerah. Sistem ini diharapkan menyediakan informasi terstruktur sebagai input bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Namun, implementasi SIMPOLDAGRI masih menghadapi sejumlah persoalan. Naskah penelitian mengidentifikasi adanya laporan daerah yang tidak selalu terkirim tepat waktu, keterlambatan input, perbedaan standar pengisian, proses validasi yang belum maksimal, pemanfaatan laporan yang masih cenderung administratif, ketidakmerataan kompetensi teknis operator, disparitas kualitas jaringan internet, belum rutinnya pelatihan, dan koordinasi pusat-daerah yang belum sepenuhnya memberikan umpan balik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sistem tidak semata-mata bergantung pada aplikasi, tetapi juga pada kapasitas manusia dan kesiapan infrastruktur yang menopangnya.

Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean menempatkan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat sistem sebagai unsur keberhasilan sistem

informasi. Dalam penelitian ini, kapasitas SDM diposisikan sebagai faktor manusia yang menentukan kemampuan pengguna memahami dan mengoperasikan sistem, sedangkan ketersediaan infrastruktur TI merupakan faktor teknis yang menentukan keandalan akses, pemrosesan, dan transmisi data. Technology Acceptance Model juga menegaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, yang dalam praktiknya sangat berkaitan dengan kualitas SDM serta dukungan infrastruktur.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menguji: (1) pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI; (2) pengaruh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI; dan (3) pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia menggambarkan kemampuan individu untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks SIMPOLDAGRI, kapasitas tersebut berkaitan dengan pengetahuan pengguna mengenai sistem dan substansi pelaporan politik, keterampilan teknis dalam mengoperasikan aplikasi, serta kemampuan analitis untuk membaca dan menginterpretasi data politik. Ketiga unsur tersebut sejalan dengan pendekatan Knowledge, Skills, and Abilities (KSA) yang digunakan dalam naskah penelitian.

Kapasitas SDM menjadi penting karena sistem informasi pemerintahan memerlukan pengguna yang bukan hanya mampu menginput data, tetapi juga memahami standar pelaporan, menjamin akurasi data, melakukan validasi, memanfaatkan informasi, dan merespons masalah operasional. Kesenjangan kompetensi akan berdampak pada keterlambatan, kesalahan input, dan menurunnya kualitas informasi yang dihasilkan.

2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi merupakan tersedianya sarana teknis yang memungkinkan sistem informasi beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, infrastruktur TI diukur melalui tiga indikator utama, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta jaringan dan komunikasi. Ketiga komponen tersebut menjadi fondasi agar SIMPOLDAGRI dapat diakses, digunakan, dan dipelihara dengan baik.

Infrastruktur yang memadai memungkinkan sistem berjalan lebih stabil, meminimalkan downtime, mempercepat pengolahan dan pengiriman data, serta menjaga keamanan dan integritas informasi. Sebaliknya, keterbatasan perangkat, aplikasi yang tidak stabil, atau jaringan yang lemah dapat menghambat ketepatan waktu laporan dan mengurangi manfaat sistem bagi pengambilan keputusan.

3. Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI

Efektivitas implementasi sistem informasi menunjukkan tingkat keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan setelah diterapkan dan digunakan. Penelitian ini menggunakan kerangka DeLone dan McLean dengan empat indikator yang ditekankan dalam instrumen, yaitu kualitas informasi (information quality), penggunaan sistem (system use), kepuasan pengguna (user satisfaction), dan manfaat bersih (net benefits). Kualitas informasi dilihat dari akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan kelengkapan data yang dihasilkan.

Penggunaan sistem menunjukkan intensitas dan keberlanjutan pemanfaatan SIMPOLDAGRI, kepuasan pengguna menggambarkan evaluasi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat sistem, sedangkan manfaat bersih mencerminkan kontribusi sistem terhadap efisiensi kerja, peningkatan kualitas analisis politik, dan kecepatan pengambilan keputusan. Efektivitas yang tinggi dengan demikian menuntut keselarasan antara aspek manusia dan aspek teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri pada periode Oktober 2025 sampai Maret 2026. Penelitian menggunakan

paradigma positivistik dengan desain kuantitatif eksplanatif dan metode survei untuk menguji hubungan kausal antara kapasitas SDM (X1), ketersediaan infrastruktur TI (X2), dan efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI (Y).

Populasi penelitian adalah 570 pengelola SIMPOLDAGRI pada Direktorat Politik Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane pada presisi 10 persen sehingga diperoleh 85 responden. Rancangan penelitian menggunakan probability sampling dengan distribusi sampel berdasarkan kelompok/strata populasi sebagaimana tercantum dalam rancangan tesis. Seluruh 85 kuesioner yang disebarkan kembali dan dapat diolah.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner skala Likert. Variabel kapasitas SDM diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan; variabel infrastruktur TI melalui perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan dan komunikasi; sedangkan efektivitas implementasi melalui kualitas informasi, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji persyaratan analisis berupa normalitas dan homogenitas, kemudian regresi linear sederhana dan berganda, uji keberartian regresi, korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F, dan korelasi parsial. Pengaruh dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI

Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan $Y = 28,971 + 0,416X1$. Koefisien regresi sebesar 0,416 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan kapasitas SDM diikuti peningkatan efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI sebesar 0,416 satuan. Uji keberartian regresi menghasilkan F hitung 26,917 dengan signifikansi 0,000, sehingga model regresi dinyatakan signifikan.

Koefisien korelasi antara kapasitas SDM dan efektivitas implementasi sebesar 0,495 menunjukkan hubungan positif pada kategori sedang atau cukup kuat. Koefisien determinasi sebesar 0,245 berarti kapasitas SDM memberikan kontribusi 24,5 persen terhadap variasi efektivitas implementasi, sedangkan 75,5 persen ditentukan faktor lain. Uji t menghasilkan t hitung 5,188 dengan signifikansi 0,000, sehingga hipotesis pertama diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai sistem dan substansi pelaporan, keterampilan mengoperasikan aplikasi, serta kemampuan analitis pengguna berperan nyata terhadap kualitas pemanfaatan SIMPOLDAGRI. SDM yang lebih kompeten akan lebih mampu menjaga akurasi informasi, ketepatan waktu pelaporan, dan pemanfaatan output sistem untuk kebutuhan organisasi.

2. Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur TI terhadap Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI

Hasil regresi variabel ketersediaan infrastruktur TI menghasilkan persamaan $Y = 15,569 + 0,799X_2$. Koefisien regresi sebesar 0,799 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan infrastruktur TI diikuti peningkatan efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI sebesar 0,799 satuan. Uji keberartian regresi menghasilkan F hitung 37,703 dengan signifikansi 0,000.

Koefisien korelasi sebesar 0,559 menunjukkan hubungan positif dalam kategori sedang atau cukup kuat. Koefisien determinasi sebesar 0,312 berarti ketersediaan infrastruktur TI memberikan kontribusi 31,2 persen terhadap efektivitas implementasi, sedangkan 68,8 persen dijelaskan oleh faktor lain. Uji t menghasilkan t hitung 6,140 dengan signifikansi 0,000 sehingga hipotesis kedua diterima.

Besarnya kontribusi infrastruktur TI lebih tinggi dibandingkan kapasitas SDM secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pada sistem pelaporan yang bergantung pada konektivitas antardaerah, keandalan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menjadi faktor operasional yang sangat menentukan. Infrastruktur yang baik memungkinkan sistem berjalan stabil, mempercepat transmisi data, meminimalkan gangguan, dan meningkatkan kualitas informasi yang diterima pusat.

3. Pengaruh Kapasitas SDM dan Infrastruktur TI secara Simultan

Regresi berganda menghasilkan persamaan $Y = 11,513 + 0,224X_1 + 0,587X_2$. Uji F menghasilkan F hitung 23,195 dengan signifikansi 0,000, sehingga kapasitas SDM dan ketersediaan infrastruktur TI secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI.

Koefisien korelasi berganda sebesar 0,601 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai R Square sebesar 0,361 berarti 36,1 persen variasi efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI dapat dijelaskan secara simultan oleh kapasitas SDM dan ketersediaan infrastruktur TI, sedangkan 63,9 persen lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Hasil ini memperkuat perspektif sosioteknikal bahwa keberhasilan sistem berbasis teknologi merupakan hasil interaksi aspek sosial dan teknis. SDM yang kompeten tanpa infrastruktur memadai akan mengalami hambatan operasional, sedangkan perangkat dan jaringan yang baik tanpa pengguna yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkan data tidak akan menghasilkan manfaat optimal. Karena itu, strategi peningkatan efektivitas SIMPOLDAGRI perlu ditempatkan sebagai agenda integratif antara pengembangan kompetensi dan penguatan infrastruktur.

Ringkasan Hasil Statistik

- Kapasitas SDM (X_1) terhadap Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI (Y): $Y = 28,971 + 0,416X_1$; $r = 0,495$; $R^2 = 0,245$; kontribusi 24,5%; $t = 5,188$; $p = 0,000$.
- Ketersediaan Infrastruktur TI (X_2) terhadap Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI (Y): $Y = 15,569 + 0,799X_2$; $r = 0,559$; $R^2 = 0,312$; kontribusi 31,2%; $t = 6,140$; $p = 0,000$.
- Kapasitas SDM (X_1) dan Ketersediaan Infrastruktur TI (X_2) terhadap Efektivitas Implementasi SIMPOLDAGRI (Y): $Y = 11,513 + 0,224X_1 + 0,587X_2$; $R = 0,601$; $R^2 = 0,361$; kontribusi 36,1%; $F = 23,195$; $p = 0,000$.

SIMPULAN

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI.

Hubungan kedua variabel berada pada kategori sedang dengan $r = 0,495$ dan kontribusi sebesar 24,5 persen. Artinya, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengelola sistem akan meningkatkan efektivitas implementasi.

2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI. Hubungan kedua variabel berada pada kategori sedang dengan $r = 0,559$ dan kontribusi sebesar 31,2 persen. Infrastruktur TI merupakan variabel parsial yang memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan kapasitas SDM.
3. Kapasitas SDM dan ketersediaan infrastruktur TI secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi SIMPOLDAGRI. Nilai $R = 0,601$ dan $R^2 = 0,361$ menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 36,1 persen variasi efektivitas implementasi. Dengan demikian, penguatan faktor manusia dan teknologi harus dilakukan secara terpadu.

SARAN

1. Direktorat Politik Dalam Negeri perlu meningkatkan kapasitas pengelola SIMPOLDAGRI melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi teknis dan analitis, serta pembinaan pemahaman mengenai pemanfaatan data politik untuk kebutuhan kebijakan.
2. Ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur TI perlu diperkuat, terutama perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dukungan teknis, dan

keamanan sistem, sehingga proses pelaporan dapat berlangsung stabil, tepat waktu, dan andal.

3. Pengembangan SIMPOLDAGRI sebaiknya dilakukan dengan pendekatan terpadu yang menghubungkan roadmap peningkatan kompetensi SDM dengan roadmap penguatan infrastruktur TI. Monitoring berkala terhadap kualitas data, ketepatan waktu, penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna juga perlu dijadikan bagian dari evaluasi implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surendran, P. (2012). Technology Acceptance Model: A Survey of Literature. *International Journal of Business and Social Research*, 2(4), 175-178.
- Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.